

KALAH MENANG BIASA
BERSALAH BUKAN KITA BIA



BAB IV

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



1



Hj. Megawati
Soekarnoputri

H. Prabowo Subianto

**PASANGAN MEGAWATI-PRABOWO
(NOMOR URUT : 1)**

A. CALON PRESIDEN

Nama Lengkap : Dyah Permata Megawati Setyawati
 Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Menikah
 Suami : Taufik Kiemas
 Anak : Tiga orang.

Riwayat Pendidikan :

- SD Perguruan Cikini Jakarta
- SLTP Perguruan Cikini Jakarta
- SLTA Perguruan Cikini Jakarta
- Fakultas Pertanian UNPAD Bandung
- Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Tahun 1954-1959
 Tahun 1960-1962
 Tahun 1963-1965
 Tahun 1965-1967
 Tahun 1970-1972

Pengalaman Organisasi :

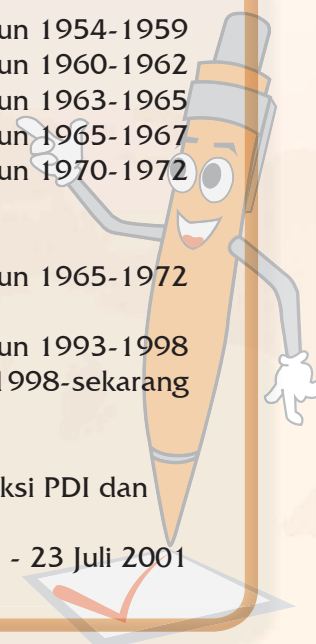
- Aktivistis GMNI
- Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
- Ketua Umum DPP PDI
- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Tahun 1965-1972
 Tahun 1993-1998
 Tahun 1998-sekarang

Pengalaman Pekerjaan :

- Anggota DPR/MPR Periode 1987-1992, 1992-1997, 1999 Pimpinan Fraksi PDI dan Anggota BKSAP DPR.
- Wakil Presiden Republik Indonesia

Oktober 1999 - 23 Juli 2001



- Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001-2004

Lain-Lain :

- Pembicara SESKOAD, SESKOGAB, SESKOU Tahun 1994-1996
- Peserta Konferensi Wanita Islam International di Pakistan Tahun 1994
- Mengikuti Konferensi Intern Parliamentary Union.

B. CALON WAKIL PRESIDEN

Nama Lengkap : H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama : Islam
Status Perkawinan : Pernah Kawin
Anak : Satu orang

Pekerjaan:

- Pengusaha

Riwayat Pendidikan:

- SD di Hongkong, Tahun 1968
- SMP di Zurich, Tahun 1970 - 1974
- SMA di American School In London, U.K. Tahun 1987
- Akabri Darat Magelang
- Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Pengalaman Pekerjaan:

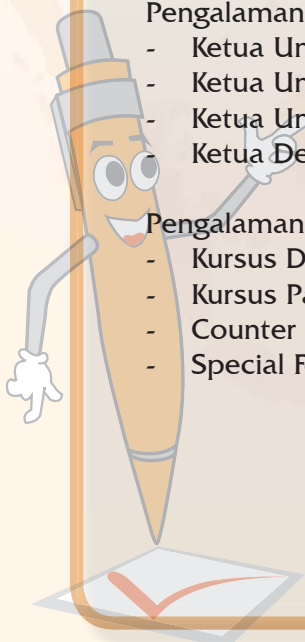
- Perwira TNI Angkatan Darat Tahun 1974 - 1988
- Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tahun 1996 - 1998
- Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Tahun 1998
- Direktur Utama PT. Tidar Kerinci Agung Indonesia sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Nusantara Energy Indonesia sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Jaladri Nusantara sampai sekarang
- Direktur Utama PT. Kertas Nusantara sampai sekarang

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2004-Sekarang
- Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) sampai sekarang
- Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) sampai sekarang
- Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Pengalaman Kursus:

- Kursus Dasar Kecabangan Infanteri Tahun 1974
- Kursus Para Komando Tahun 1975
- Counter Terrorist Course GSG-9, Germany Tahun 1981
- Special Force Officer Course, FT Benning USA Tahun 1981



Visi dan Misi Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto 2009-2014

Visi

Gotong Royong Membangun Kembali Indonesia Raya yang Berdaulat,
Bermartabat, Adil, dan Makmur.

Misi

- Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.

Program Utama Bidang Ekonomi

1. Kebijakan Fiskal yang Efektif

Kebijakan fiskal selama ini tidak mengarah pada penguatan ekonomi secara jangka panjang, yang disebabkan karena kebiasaan untuk menggunakan anggaran defisit yang membebani APBN. MEGA PRABOWO akan menjalankan kebijakan fiskal yang visioner untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, termasuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak maupun PNBPN dan menghindari hutang luar negeri.

2. Kebijakan Moneter yang Mendorong Sektor Riil Serta Reformasi Arsitektur Finansial Global

Tantangan dalam bidang moneter adalah mengatasi tantangan ketersediaan likuiditas bagi penguatan sektor riil, inflasi serta ketidakstabilan nilai rupiah. MEGA PRABOWO akan bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan demi penguatan sektor riil dan untuk ambil bagian dalam reformasi arsitektur finansial global.

3. Regulasi Pasar Finansial

Pasar finansial menjadi penyebab krisis finansial akibat kapitalisasinya yang luar biasa besar, tetapi sifatnya yang tidak stabil. MEGA PRABOWO akan memastikan aturan yang lebih ketat terhadap pasar finansial dan mendorong kontribusinya bagi perekonomian sektor riil.

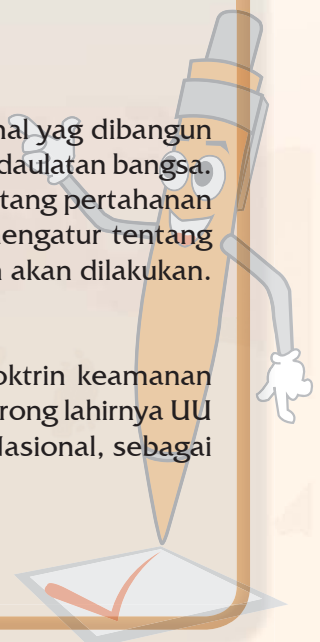
Program Utama Bidang Kedaulatan Bangsa

1. Memperkuat Pertahanan Negara dan Kedaulatan Bangsa

Sistem keamanan nasional merupakan salah satu bagian dari sistem nasional yang dibangun untuk mencapai tujuan nasional di bidang keamanan nasional, yaitu melindungi kedaulatan bangsa. MEGA PRABOWO akan mendorong revisi Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga teknis operasionalisasi kebijakan pertahanan negara dapat mengatur tentang bagaimana mekanisme koordinasi dalam menghadapi gradasi eskalasi ancaman akan dilakukan.

2. Dewan Keamanan Nasional

Kita belum punya doktrin keamanan nasional, doktrin pertahanan luar, doktrin keamanan dalam negeri, dan doktrin diplomasi internasional. MEGA PRABOWO akan mendorong lahirnya UU Keamanan Nasional, yang akan merumuskan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, sebagai badan yang berwenang mengkoordinasikan seluruh kebijakan.



Program Utama Bidang Sosial Politik

1. Penyederhanaan Partai Politik dan Efisiensi Pembuatan Kebijakan Publik

Banyaknya partai politik peserta pemilu tanpa ada pembeda dalam hal ideologi dan program membuat sulit rakyat untuk memilih sesuai dengan keyakinannya dan berdampak pada landasan demokrasi. MEGA PRABOWO berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu perlu untuk dilakukan melalui seleksi dan persyaratan yang ketat.

2. Otonomi Daerah yang Efektif dan Potensi Desa

Tingkat keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah bergantung pada partisipasi masyarakat di daerah. MEGA PRABOWO akan memberikan kerangka hukum bagi pemberdayaan, partisipasi serta perluasan otonomi daerah, terutama di tingkat desa, agar dapat secara optimal memanfaatkan potensi lokal yang ada; memperjuangkan legislasi serta revisi kebijakan yang pada intinya akan melindungi hak-hak sipil masyarakat daerah, terutama di desa, di samping menumbuhkembangkan kesadaran serta kewajiban mereka sebagai warga negara; dan mendorong warga desa yang mengenal kepala desa/lurahnya untuk berperan lebih aktif untuk ikut bersama-sama merumuskan program-program pembangunan desa.

3. Reformasi Birokrasi

Problem serius seperti pelayanan yang lambat, KKN, struktur yang gemuk masih menjangkiti birokrasi di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak berjalan maksimal. MEGA PRABOWO akan mereformasi birokrasi agar dapat berperan maksimal dalam menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal maupun eksternal; menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha; dan menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

4. Koordinasi Antar Sektor Demi Efektifitas Implementasi Kebijakan

Masing-masing departemen seringkali bertindak dan menjalankan program secara sendiri-sendiri tanpa mengetahui konsekuensinya serta kemungkinan terjadinya tumpah tindih. Hal yang juga berdampak pemborosan anggaran pembangunan dan membuat agenda pembangunan tidak terintegrasi dan terarah. MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa harus ada kepemimpinan langsung dan kuat oleh presiden dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor.

5. Penegasan Politik Luar Negeri yang Bebas-Aktif

MEGA PRABOWO akan kembali menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. MEGA PRABOWO menafsirkan prinsip bebas aktif sebagai sebuah situasi bagi Indonesia untuk bebas memilih dengan siapa ia bisa memajukan kepentingan nasionalnya secara aktif.

6. Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Politik

Selama pemerintahan masa transisi, telah terjadi kemajuan status perempuan yang cukup berarti, namun realitas ketimpangan gender masih persisten. MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa pencapaian hak perempuan masih perlu mendapat dukungan afirmatif dengan menjamin kesamaan akses perempuan untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan; dan mengintegrasikan perspektif jender dalam perundangan, kebijakan publik serta program-program pembangunan.

Program Utama Bidang Hukum

1. Politik Peraturan Perundangan

Politik Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu problem dan tantangan serius untuk membangun dan menegakkan hukum demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. MEGA PRABOWO akan menyusun disain dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; memperkuat kerjasama antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

2. Penataan Kelembagaan Negara

Pembangunan kelembagaan negara telah mengalami pergeseran dan perubahan setelah Amandemen Konstitusi UUD 1945 Sistem ketatanegaraan mengenai Kelembagaan Negara mengalami pegeseran dan perubahan. MEGA PRABOWO akan membangun Kelembagaan Negara yang terukur, terfokus, terarah, efektif dan efisien dapat menciptakan kepastian dan kejelasan keberadaan lembaga negara demi untuk rakyat.

3. Optimalisasi Struktur dan Aparatur Pelayan dan Penegak Hukum

Optimalisasi struktur dan aparatur pelayan dan penegak hukum menjadi problem dan tantangan mendesak untuk dilaksanakan. Struktur dan aparatur secara formal sudah bertugas namun secara substansial belum atau kurang menunjukkan kualitas komitmen dan kinerja yang optimal. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab jajaran struktur dan aparatur hukum berkaitan dengan upaya menjadikan hukum sebagai alat perjuangan mensejahterakan rakyat. Apabila aparatur pelayan hukum tidak kredibel dan tidak profesional akan mengakibatkan rakyat semakin kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.

4. Promosi dan Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM)

MEGA PRABOWO melihat pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum seimbang antara pelaksanaan Hak Sipil-Politik dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasca reformasi pelaksanaan HAM masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi, sementara hak sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. MEGA PRABOWO bertekad memenuhi hak warga atas pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang.

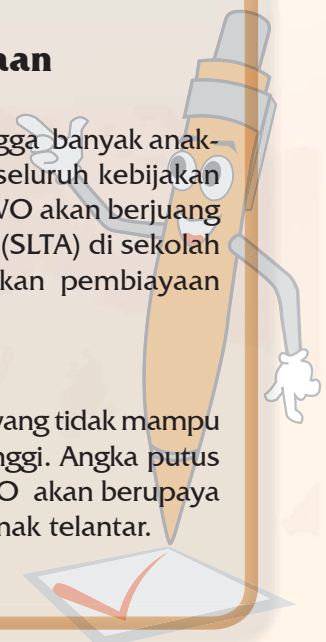
Program Utama Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan Terjangkau untuk Rakyat

Komersialisasi pendidikan membuat biaya pendidikan semakin mahal, sehingga banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah. MEGA PRABOWO secara tegas menolak seluruh kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan. MEGA PRABOWO akan berjuang agar pendidikan dasar (SD-SLTP) tanpa dipungut biaya; pendidikan menengah (SLTA) di sekolah negeri tidak dipungut biaya; pendidikan tinggi yang terjangkau; dan menyediakan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi unggulan.

2. Partisipasi Sekolah Meningkatkan

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak peserta didik yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah masih tinggi karena biaya pendidikan yang makin tinggi. MEGA PRABOWO akan berupaya memperluas akses pendidikan; dan menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak telantar.



3. Reformasi Kurikulum Pendidikan

Materi kurikulum yang cenderung tumpang tindih dan terlalu banyak tanpa mempertimbangkan relevansi dengan minat dan kemampuan peserta didik, sehingga membebani peserta didik. MEGA PRABOWO akan mendorong reformasi materi kurikulum; pemberlakuan automatic promotion di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan sistem magang berbasis kompetensi di jenjang pendidikan tinggi.

4. Keadilan Pendidikan Antar Wilayah

Perbedaan antar wilayah dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, menyebabkan disparitas yang tajam tingkat pendidikan di setiap wilayah. MEGA PRABOWO akan berjuang agar fasilitas dan pembangunan infrastruktur pendidikan dibangun secara merata di setiap wilayah dengan memprioritaskan wilayah-wilayah tertinggal dan melakukan rekrutmen guru yang berkualitas dan menjaga keseimbangan distribusi ketersediaan guru di wilayah tertinggal yang didukung dengan pemberian kemudahan fasilitas, insentif, jaminan hidup yang memadai dan promosi karir yang jelas.

5. Memperkuat Budaya Lokal

Globalisasi selain memberikan manfaat yang memudahkan kita dalam mengakses sumber-sumber informasi, juga mempunyai dampak negatif berupa melemahnya perhatian dan minat masyarakat terhadap ekspresi dan kearifan budaya lokal, MEGA PRABOWO akan melaksanakan program untuk melindungi tradisi atau hasil budaya lokal yang dianggap mulai punah dan memberikan insentif sosial ekonomi kepada kerja-kerja kebudayaan.

6. Sistem Monitoring Konflik Nasional

Pasca reformasi, beragam konflik sosial yang sifatnya kolektif banyak terjadi di Indonesia. MEGA PRABOWO akan mengembangkan sistem monitoring konflik nasional, yang dilakukan secara sistematis, sehingga konflik yang akan terjadi dapat diantisipasi sejak awal.

7. Kesadaran Keragaman Budaya

Masih banyak ditemui konflik sosial secara kolektif, dan di masa mendatang indikasi konflik masih berpotensi terjadi. MEGA PRABOWO akan memberikan jaminan politik dan perlindungan hukum kepada setiap kelompok masyarakat dalam mengekspresikan praksis kebudayaan; dan menekankan tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi suatu masyarakat lainnya dalam melakukan ekspresi budaya; dan mendorong pendidikan keragaman.

PROGRAM AKSI

Program Aksi Mega-Prabowo 2009-2014 terdiri dari delapan program yang disebut sebagai delapan program untuk kemakmuran rakyat. Program aksi tersebut adalah:

1. Menjadikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.
2. Mencapai perekonomian yang berdaulat, adil, dan makmur.
3. Melaksanakan ekonomi kerakyatan.
4. Membangun kedaulatan pangan dan energi.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif dalam melayani masyarakat.
6. Menciptakan sumberdaya manusia bangsa yang unggul, berpendidikan, sehat, dan berkepribadian dalam budaya melalui pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
8. Membangun infrastruktur untuk rakyat di pedesaan melalui delapan program desa.

- I. Program aksi untuk menjadikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat antara lain:
 1. Menjadwalkan kembali utang luar negeri dan mengalihkannya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.
 2. Menyelamatkan kekayaan negara dengan meninjau kembali kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.
 3. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 4. Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas pembiayaan ekspor impor dari negara untuk menyimpan dana hasil eksportnya di bank dalam negeri.
 5. Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk membangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.

- II. Program aksi untuk kedaulatan ekonomi antara lain:
 1. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.
 2. Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah.
 3. Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2.000 menuju USD 4.000.
 4. Membangun sarana dan prasarana transportasi massal.

- III. Program aksi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
 1. Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan, dan pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 2. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
 3. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang.
 4. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran (TKI dan TKW).
 5. Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 6. Meningkatkan anggaran untuk petani, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
 7. Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

- IV. Program Aksi Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi
 1. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.
 2. Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
 3. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
 4. Mendirikan kilang-kilang minyak pabrik bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG).
 5. Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta hektar hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt ethanol/tahun).

- V. Program Aksi Menyelenggarakan Pemerintah yang Tegas, Bersih dan Efektif dalam Melayani Rakyat.
 1. Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
 2. Mempercepat reformasi birokrasi.
 3. Penegakan hukum dan penanganan korupsi tanpa pandang bulu.

- VI. Program Aksi untuk Pendidikan Kesehatan dan Kebudayaan
 1. Wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara.



2. Mengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
3. Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun.
4. Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa, guru dan pengajar.
5. Memberikan beasiswa dan fasilitas kredit untuk membiayai mahasiswa potensial yang kurang mampu.
6. Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana).
7. Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas.
8. Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
9. Menggerakkan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin.
10. Mengembangkan karakter bangsa yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan dan melestarikan peninggalan serta warisan budaya bangsa.

VII. Program Aksi untuk Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan penghijauan kembali 59 juta hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.
2. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.
3. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
4. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.

VIII. Program Aksi Membangun Infrastruktur untuk Rakyat di Pedesaan melalui Delapan Program Desa.

1. Listrik dan air bersih desa.
2. Bank dan lembaga keuangan desa.
3. Koperasi desa, lumbung desa, pasar desa.
4. Klinik desa.
5. Pendidikan desa.
6. Infrastruktur pedesaan dan daerah pesisir.
7. Rumah sehat pedesaan.
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

